



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Determinan Internal dan Eksternal Dalam Rekonsiliasi Hubungan  
Turki dan Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Dalam Perspektif  
Turki**

Skripsi Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Bintang Lazuardi

2014330032

Bandung 2020



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Determinan Internal dan Eksternal Dalam Rekonsiliasi Hubungan  
Turki dan Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Dalam Perspektif  
Turki**

Oleh Bintang Lazuardi

2014330032

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Bandung 2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

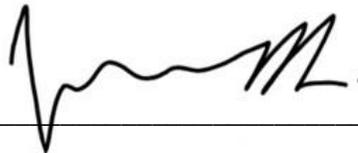
Nama : Bintang Lazuardi  
Nomor Pokok : 2014330032  
Judul : Determinan Internal dan Eksternal Dalam Rekonsiliasi  
Hubungan Turki dan Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Dalam  
Perspektif Turki

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 12 Agustus 2020 Dan dinyatakan  
**LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

**Sekretaris**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

: 

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Surat Pernyataan

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

Determinan Internal dan Eksternal Dalam Rekonsiliasi Hubungan Turki dan Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Dalam Perspektif Turki

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung,  
Tanggal 22 Juni 2020



Bintang Lazuardi  
NPM : 2014330032

## Abstrak

Nama : Bintang Lazuardi

NPM : 2014330032

Judul : Determinan Internal dan Eksternal Dalam Rekonsiliasi Hubungan Turki dan Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Dalam Perspektif Turki

-----

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Determinan internal dan eksternal apa sajakah yang mempengaruhi proses rekonsiliasi Turki dan Israel pasca insiden Mavi Marmara?”. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari tahun 2010 hingga 2016 setelah tiga momen dimana hubungan Turki dan Israel memburuk secara signifikan. Momen tersebut adalah Operation Cast Lead yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Israel ke Palestina, Insiden Davos dimana Erdogan walkout dari debatnya bersama Shimon Peres di World Economic Forum, dan insiden Flotilla atau disebut sebagai insiden Mavi Marmara akibat blokade laut yang dilakukan Israel. Penelitian ini menggunakan konsep determinan internal dan determinan eksternal oleh Lloyd Jensen dan konsep rekonsiliasi.

Menurut Lloyd Jensen ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dan dalam kasus ini, pengambilan keputusan rekonsiliasi Turki dan Israel. Faktor internal berupa faktor idiosinkratik yaitu kepribadian Erdogan dan partai *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP), faktor masyarakat dengan karakteristik Islaminya, faktor ekonomi dengan kebutuhan akan diversifikasi impor gas alam, faktor militer dimana kapabilitas militer Turki lebih unggul secara numerik dari Israel. Faktor eksternal meliputi faktor kesepakatan nuklir Iran dengan negara P5+1 (Cina, Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat), faktor peran Amerika Serikat sebagai fasilitator langsung dalam awal rekonsiliasi, faktor situasi krisis penyatuan Siprus, dan Rusia terkait insiden penembakan pesawat Rusia pada 24 November 2015.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi Turki untuk melakukan perbaikan hubungan dengan Israel. Turki yang awalnya tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan rekonsiliasi mau tidak mau memperbaiki hubungan dengan Israel secara serius karena krisis dengan Rusia, posisi Iran setelah kesepakatan nuklirnya dan keinginan Turki untuk diversifikasi impor gas alam

## Abstract

Name : Bintang Lazuardi

NPM : 2014330032

Title : Internal and External Determinants in the Reconciliation of Turkey and Israel After the Mavi Marmara Incident In the Perspective of Turkey

-----

This qualitative research with the goal of answering the question “What internal and external determinants that influences the reconciliation process between Turkey and Israel after the Mavi Marmara Incident?” This research uses secondary data from year 2010 until 2016 after three moments where the relations between Turkey and Israel significantly deteriorated. Those moments are Operation Cast Lead that is done by Israel to Palestine in the year 2008, the Davos incident where Erdogan walked out of his debate with Shimon Peres on the World Economic Forum, and the Flotilla incident or the Mavi Marmara incident due to the naval blockade done by Israel. This research uses the concept of internal and external determinants by Lloyd Jensen and the concept of reconciliation.

According to Lloyd Jensen there are internal and external factors influencing the foreign policy of a state and in this case, the decision of reconciliation of Turkey and Israel. The internal factors were the Idiosyncratic Factors in the form of Erdogan and his party *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP), the Societal Factor with Turkey’s Islamic characteristics, the Economic Factor with the need to diversify natural gas imports, the Military Factor where Turkey’s military capability is numerically superior to Israel. External factors also influences, like Iran with the nuclear deal with P5+1 countries (China, Russia, United Kingdom, Germany, France, United States of America), the factor of United States of America as a direct facilitator in the beginnings of normalization, the factor of Cyprus reunification crisis situation, and Russia in regards to the downing of Russia’s plane on November 24<sup>th</sup> 2015

This research shows that the external factors are more dominant in influencing Turkey to reconcile with Israel. Turkey which in the beginning has no need to rush in the attempt of reconciliation were forced to fix the relationship with Israel seriously after the crisis with Russia, Iran’s position after the nuclear deal and Turkey’s wish to diversify natural gas imports.

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Determinan Internal dan Eksternal Dalam Rekonsiliasi Hubungan Turki dan Israel Pasca Insiden Mavi Marmara Dalam Perspektif Turki.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi program S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dihargai dalam menyempurnakan skripsi ini

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah tercinta Achmad Fadilla dan Ibu tercinta Sofiana yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moral maupun material. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Yulius Purwadi Hermawan selaku Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M. Si yang membantu saya mengawali skripsi ini pada masa mata kuliah seminar
2. Ibu Sylvia Yazid yang membantu saya sebelum skripsi ini dimulai dengan informasi penting mengenai perubahan kurikulum
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk ilmunya yang diberikan selama masa perkuliahan
4. Teman-teman saya seangkatan yang membantu menjaga hari-hari saya di kampus agar tetap menyenangkan
5. Teman-teman dalam Komunitas Unit Kebudayaan Jepang dan Korea yang memberikan tempat bagi saya untuk tetap berada dalam hobi saya yaitu animasi jepang dan video game.
6. Adik-adik saya yang membantu saya dari rasa kebosanan saat menyelesaikan skripsi di rumah

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dan referensi dalam penelitian yang akan datang

Bandung, 17 Juli 2020

Penulis

Bintang Lazuardi

NPM : 2014330032

# Daftar Isi

Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.5 Tujuan penelitian.....	6
1.6 Kegunaan penelitian.....	6
1.7 Literature review .....	6
1.8 Kerangka Pemikiran.....	10
1.9 Metodologi penelitian .....	19
1.10 Sistematika pembahasan .....	21
BAB II Fluktuasi Hubungan Turki dan Israel.....	22
2.1 Latar Belakang Hubungan Turki dan Israel .....	22
2.1.1 Turki sebagai negara Islam pertama yang mengakui Israel .....	22
2.1.2 Israel sebagai sekutu non-religius Turki.....	24
2.2 Konflik dan Kerjasama Turki dan Israel.....	25
2.2.1 Lebanon War, awal hubungan yang buruk.....	26
2.2.2 <i>Madrid Peace Conference</i> , meningkatnya hubungan Israel dan Turki ke status diplomatik penuh.....	26
2.2.3 <i>Oslo Agreement</i> , Keputusan yang melegakan Turki pada masa itu .....	27
2.3 Insiden yang memperkeruh hubungan Israel dan Turki.....	29
2.3.1 <i>Operation Cast Lead (OCL)</i> .....	29
2.3.2 Insiden Davos .....	30
2.3.3 Insiden Mavi Marmara .....	31
2.4 Penjelasan mengenai rekonsiliasi hubungan antara Turki dan Israel.....	32
2.4.1 Langkah menuju rekonsiliasi.....	32
2.4.2 Resminya rekonsiliasi antara Turki dan Israel .....	35
Bab III Faktor Yang Mempengaruhi Rekonsiliasi Turki dan Israel .....	37
3.1 Faktor Internal .....	37
3.1.1 Pengaruh Erdogan, dan Partai AKP .....	37
A. Profil Recep Tayyip Erdoğan .....	38

B. Posisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) .....	40
C. Dalam Konteks Rekonsiliasi dengan Israel.....	43
3.1.2 Karakteristik Sosial masyarakat Turki .....	44
A. Pengaruh Islam dan sekularisasi di Turki .....	44
B. Persepsi masyarakat Turki mengenai politik luar negeri Turki .....	48
3.1.3 Ekonomi Turki.....	50
A. GDP Turki tahun 2007 hingga 2018 .....	51
B. Ekspor dan Impor Turki .....	53
a. Ekspor Turki dan pengaruhnya .....	54
b. Impor Turki dan pengaruhnya .....	58
c. European Commission – Turkey Customs Union .....	62
C. Dalam Konteks rekonsiliasi antara Turki dan Israel .....	63
a. Supply dan Demand gas alam untuk Turki .....	64
b. Faktor terbesar : Krisis Turki-Rusia 2015 dan panggilan untuk diversifikasi ..	65
c. Hubungan Ekonomi Turki dan Israel secara umum.....	67
d. Pencarian pasar gas alam baru untuk Israel.....	68
3.2 Faktor Eksternal .....	69
3.2.1 Kesepakatan nuklir Iran.....	70
3.2.2 Peran Amerika Serikat sebagai fasilitator .....	72
3.2.3 Krisis penyatuan Siprus .....	74
3.2.4 Situasi diplomatik dengan Rusia .....	75
Bab IV Kesimpulan.....	78
Daftar Pustaka.....	82

## **Daftar Grafik**

Grafik 3.1 : pertumbuhan GDP Turki tahun 2007-2018 .....	52
Grafik 3.2 : GDP Turki menggunakan nilai dolar AS tahun 2010 .....	53
Grafik 3.3 : Ekspor Turki 2017 berdasarkan komoditas .....	54
Grafik 3.4 : Ekspor Turki 2016 berdasarkan komoditas .....	55
Grafik 3.5 : Target negara untuk Ekspor Turki 2017 .....	56
Grafik 3.6 : Target negara untuk Ekspor Turki 2016 .....	57
Grafik 3.7 : Impor Turki 2017 berdasarkan komoditas .....	59
Grafik 3.8 : Impor Turki 2016 berdasarkan komoditas .....	60
Grafik 3.9 : Negara sumber Impor Turki 2017 .....	61

## Daftar Singkatan

AIFV	: Armored Infantry Fighting Vehicle
AKP	: Adalet ve Kalkınma Partisi
APC	: Armored Personnel Carrier
AWACS	: Airborne Warning and Control Systems
DMP	: Decision Making Process
EC	: European Commission
FP	: Fazilet Partisi
GDP	: Gross Domestic Product
IDF	: Israel Defense Forces
IEA	: International Energy Agency
JCPOA	: Joint Comprehensive Plan of Action
ktoe	: kilotonnes to oil equivalent
LPG	: Liquefied Petroleum Gas
MBT	: Main Battle Tank
MGK	: Milli Güvenlik Kurulu
MNP	: Milli Nizam Partisi
MOU	: Memorandum of Understanding
MSP	: Millî Selâmet Partisi
MTTB	: Milli Türk Talebe Birliği
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
OCL	: Operation Cast Lead
OEC	: Observatory of Economic Complexity
OPE	: Operation Protective Edge
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PETFORM	: Petroleum and Natural Gas Platform Association
PKK	: Partiya Karkaren Kurdistan
PLO	: Palestine Liberation Organization
PNM	: Palestinian National Movement
RP	: Refah Partisi
SP	: Saadet Partisi
TC	: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı
TESEV	: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
TFC	: Total Final consumption
TGS	: Turkish General Staff
TJ	: Terajoule
TPES	: Total Primary Energy Supply
UAV	: Unmanned Aerial Vehicle
UN	: United Nations
UNSCOP	: United Nations Special Committee On Palestine
USD	: United States Dollar
WEF	: World Economic Forum

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan kedua negara secara politik luar negeri memang sudah tidak asing lagi dengan yang kita kenal dengan istilah “naik-turun” sama seperti hubungan antar individu dimana yang membedakan hubungan antar negara dan individu adalah skalanya saja. Turki dan Israel sudah mengawali hubungan mereka sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dimana Turki menjadi negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan Israel.<sup>1</sup> Awal mula terbentuknya Israel adalah karena keputusan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa, *United Nations* atau UN dalam bahasa Inggris) untuk membuat satu komite bernama *United Nations Special Committee On Palestine* (UNSCOP) yang dibentuk atas dasar deklarasi Inggris yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk mengurus konflik di Palestina lebih lanjut dan memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pengambilan solusi terhadap konflik terkait sebelum pada akhirnya mundur dari Palestina. UNSCOP melahirkan Resolusi 181 atau bisa disebut sebagai *United Nations Partition Plan for Palestine* yang memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua negara yaitu negara Arab dan negara Yahudi.<sup>2</sup> Negara Yahudi tersebut adalah negara yang kita tahu sebagai Israel.

Hubungan Turki dan Israel sejak awal pembentukan hanya sebatas pengakuan kedaulatan dimana Turki adalah negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan Israel tetapi Turki selalu mendukung Palestina dalam hal ini jadi tidak terjadi sebuah insiden signifikan sebelum tahun 1991. Hubungan kedua negara yang minim ini sempat masuk ke titik terendah mereka saat perang Libanon yang terjadi pada tahun 1967 hingga 1982 yang diprakarsai oleh *Palestinian National Movement* (PNM) melalui kekuatan militer mereka pada saat itu *Palestine Liberation Organization* (PLO).<sup>3</sup> Momen dimana hubungan Turki dan Israel memburuk adalah setelah Israel diketahui membantu secara langsung terhadap pembantaian Sabra dan Shatilla dimana milisi Kristen Libanon membantai lebih dari seribu pengungsi Palestina dan warga Libanon (banyak di

---

<sup>1</sup> Özkeçeci-Taner, B. (2012). From Allies to Frenemies and Inconvenient Partners: Image Theory and Turkish-Israeli Relations. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 17(3)..

<sup>2</sup> Nasrallah, R. (2002). The road to partition. *Palestine-Israel Journal of Politics, Economics, and Culture*, 9(4), 58.

<sup>3</sup> Op cit

antara mereka adalah penganut aliran Shiah).<sup>4</sup> Kejadian tersebut terjadi pada bulan September tahun 1982 dan itu menyebabkan amarah publik di Turki.

Momen penting lain dalam hubungan Turki dan Israel adalah Konferensi Perdamaian Madrid pada tahun 1991 setelah perang teluk dimana negara seperti Libya, Palestina, Iraq, dan negara lainnya yang menolak untuk ikut dalam negosiasi perdamaian jatuh dalam kondisi kekacauan. Konferensi ini merubah hubungan negara arab dan Israel dan menciptakan preseden untuk negosiasi perdamaian selanjutnya.<sup>5</sup> Turki meningkatkan hubungannya dengan Israel menjadi status kedutaan yang penuh.<sup>6</sup>

Hubungan Turki dan Israel semakin membaik khususnya setelah mereka menandatangani banyak dokumen yang menyatakan kerjasama baik itu di bidang ekonomi, maupun bidang militer. Media Turki sejak tahun 1993 banyak meliput hubungan Turki dan Israel sebagai sesuatu yang positif. Selain liputan dari media Turki, perdana menteri pada masa itu yang bernama Bülent Ecevit pernah mengatakan bahwa “Turki membutuhkan Israel yang aman, dan saya percaya Israel membutuhkan Turki yang aman”. Di sisi lain media Israel juga menganggap Turki sebagai sekutu untuk menyalurkan Israel dengan negara di kawasannya, serta melawan apa yang mereka sebut sebagai musuh alami Israel yaitu : Iran dan Suriah.<sup>7</sup>

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Tidak semua hubungan baik itu antar negara maupun antar individu selalu berjalan baik dan tentu saja hubungan Turki dan Israel akan mengalami hal yang sama. Hubungan kedua negara ini bisa dikatakan seperti hubungan saudara karib namun semua itu mulai berubah pada tahun 2002 dimana retakan dalam hubungan antara Turki dan Israel mulai terlihat. 3 April 2002, dalam upaya untuk mengambil kembali West Bank dengan cara militer diketahui Israel melakukan invasi langsung ke kota Jenin yang juga digunakan sebagai tempat pengungsian. Tindakan tersebut menelan korban sipil asal Palestina sebanyak lima puluh orang. Israel menginvasi kota Jenin

---

<sup>4</sup> Siklawi, R. (2017). The Palestinian Resistance Movement In Lebanon 1967–82: Survival, Challenges, and Opportunities. *Arab Studies Quarterly*, 39(3), 923-937.

<sup>5</sup> Bannerman, M. G. (1992). Arabs and Israelis: slow walk toward peace. *Foreign Affairs*, 142-157.

<sup>6</sup> Özkeçeci-Taner, B. (2012). From Allies to Frenemies and Inconvenient Partners: Image Theory and Turkish-Israeli Relations. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 17(3).

<sup>7</sup> Lewin, A. (2000). Turkey and Israel: Reciprocal and mutual imagery in the media, 1994-1999. *Journal of International Affairs*, 239-261.

dengan membombardir kota tersebut dari udara menggunakan helikopter, tidak termasuk angkatan darat yang memasuki kota tersebut.<sup>8</sup>

Hubungan Turki dan Israel setelah tahun 2002 mengalami masa naik turun dimana Turki dan Israel memberikan reaksi yang tidak terlalu menghebohkan dan kedua negara tersebut melanjutkan hubungan diplomatik mereka. Namun setelah tahun 2002 ada tiga kejadian penting yang memaknai keterpurukan hubungan kedua negara tersebut lebih lanjut, yaitu : serangan di Gaza selama tiga minggu oleh Israel pada tahun 2008, insiden “Davos” pada Januari 2009, dan “Mavi Marmara” atau yang bisa disebut sebagai insiden Flotilla pada tahun 2010.<sup>9</sup>

Serangan pada tahun 2008 adalah operasi militer Israel yang dinamakan *Operation Cast Lead* (OCL). Serangan ini dilakukan Israel untuk menghancurkan Hamas melalui dua fase. Fase pertama atau yang bisa dikatakan sebagai fase pembukaan diselesaikan dengan cara serangan udara yang dilakukan oleh *Drone* atau pesawat tanpa awak yang menjatuhkan 100 ton bom ke beberapa tempat yang diduga dikendalikan oleh Hamas seperti pos keamanan, terowongan yang digunakan untuk penyelundupan, dan tempat apapun yang menjadi simbol kekuatan Hamas. Fase kedua dari OCL dilakukan dengan menggunakan kekuatan angkatan darat Israel yang ditugaskan untuk mengambil daerah dimana serangan balik Palestina oleh roket dilakukan, meskipun serangan dari udara terus dilakukan tetapi fase ini lebih bertujuan untuk mengepung area kekuasaan Hamas.<sup>10</sup> Serangan ini sangat disayangkan oleh Turki karena beberapa hari sebelum OCL dilakukan diketahui perdana menteri Israel pada waktu itu yang bernama Ehud Olmert sedang berada di Ankara yang merupakan ibukota Turki. Ehud Olmert dan perdana menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan serta menteri luar negeri Turki Ahmet Davutoğlu sedang membicarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan cara yang damai.<sup>11</sup>

Insiden Davos, merupakan kejadian dimana Erdogan memutuskan untuk *Walkout* dari *World Economic Forum* (WEF) yang dilaksanakan di kota Davos, Switzerland (alasan disebut sebagai insiden Davos). Di sana Erdogan mengkritik keras apa yang dilakukan Israel di Gaza

---

<sup>8</sup> Tabar, L. (2012). The “Urban Redesign” of Jenin refugee camp: Humanitarian intervention and rational violence. *Journal of Palestine Studies*, 41(2), 44-61.

<sup>9</sup> Özkeçeci-Taner, B. (2012). From Allies to Frenemies and Inconvenient Partners: Image Theory and Turkish-Israeli Relations. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 17(3).

<sup>10</sup> LEAD, D. O. C. (2009). The Israeli arsenal deployed against Gaza during operation cast lead. *Journal of Palestine Studies*, 38(3).175-191.

<sup>11</sup> Op cit

kepada presiden Israel Shimon Peres. Alasan utama yang menyebabkan forum ini menjadi sebuah insiden adalah karena omongan Erdogan selalu dipotong oleh moderator panel memaksa dia untuk mempercepat omongannya. Di WEF diketahui Shimon Peres mendapat waktu bicara selama 25 menit sementara Erdogan hanya mendapat 12 menit. Erdogan tidak tinggal diam, bahkan dia selalu meminta tambahan waktu kepada moderator namun harus selalu dipercepat dengan alasan “waktu makan malam”. Hal pendukung lainnya adalah ketika Shimon Peres menanggapi serangan di Gaza adalah demi keamanan Israel dimana setelah argumen tersebut diberikan banyak penonton memberikan tepuk tangan kepada Peres, Erdogan dengan emosi yang meledak sampai mengatakan “*You know well how to kill* “. <sup>12</sup>

Titik terendah dalam hubungan Turki dan Israel ada pada insiden Flotilla tanggal 31 Mei 2010. Saat itu Turki sedang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza serta beberapa aktivis dari *Free Gaza Movement* dan lembaga amal Turki melalui jalur laut dengan enam kapal, dan salah satu kapal tersebut bernama Mavi Marmara. Israel waktu itu melakukan blokade pada jalur yang dilalui enam kapal tersebut dengan alasan agar tidak ada penyelundupan khususnya senjata yang sampai ke pihak Hamas. Israel mendesak bahwa kapal tersebut harus berlabuh di pelabuhan Ashdod untuk inspeksi dan penyaluran bantuan melalui jalur yang disediakan Israel dan jika tidak patuh maka akan ditindak tegas. Tindakan Israel tersebut merenggut sembilan nyawa rakyat sipil dan kapal tersebut dibawa ke Ashdod dan penumpang kapal tersebut ditahan. Tindakan ini membuat Turki marah bahkan menteri luar negeri Turki mengatakan bahwa tindakan ini setara dengan pembajakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh negara bahkan melanggar hukum internasional. <sup>13</sup>

Setelah insiden tersebut hubungan Turki dan Israel terlihat semakin memburuk dengan ditariknya duta besar Turki untuk Israel di Tel Aviv. Turki juga mengeluarkan diplomat asal Israel dari tanah Turki karena Israel dianggap tidak mau minta maaf atas insiden Flotilla. Turki juga mengatakan bahwa alasan Turki tidak berperang secara langsung dengan Israel adalah karena

---

<sup>12</sup> Prakash, D., & Ilgit, A. (2017). More than a feeling: Emotional responses to international criticism in Erdoğan's Turkey. *Review of International Studies*, 43(1), 130-151.

<sup>13</sup> Guilfoyle, D. (2011). The Mavi Marmara incident and blockade in armed conflict. *The British Yearbook of International Law*, 81(1), 171-223.

kesabaran Turki sebagai respon Erdogan ketika ditanya media *Al-Jazeera* mengenai insiden Flotilla yang telah berlalu.<sup>14</sup>

Langkah menuju rekonsiliasi hubungan Turki dan Israel diawali pada tahun 2012 hingga 2013. Pada tahun 2012 Israel setuju untuk menjual peralatan militer ke Turki sebagai langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua negara tersebut. Tahun 2013 memberi langkah lebih pasti untuk rekonsiliasi hubungan dimana presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadi fasilitator melalui panggilan telepon antara Netanyahu dan Erdogan. Netanyahu meminta maaf dan setuju untuk membayar kompensasi ke Turki, dan Turki setuju untuk menarik semua tuntutan hukum kepada tentara Israel. Proses rekonsiliasi sempat tertunda pada tahun 2014 karena *Operation Protective Edge* oleh Israel dan memperkuat sentimen anti-Israel di Turki.<sup>15</sup>

Pada tahun 2015 terjadi perubahan di kawasan Timur Tengah, salah satunya adalah keinginan bersama dari Turki dan Israel dalam stabilisasi Suriah dan membendung efeknya ke negara mereka. Kesepakatan nuklir Iran, yang membuat Iran semakin mampu untuk mencapai aspirasinya di kawasan Timur Tengah juga menjadi alasan agar Turki dan Israel melakukan rekonsiliasi. Alasan terkuat untuk rekonsiliasi merupakan kebutuhan gas alam Turki. Penembakan pesawat Rusia oleh Turki mengingatkan Turki untuk diversifikasi impor gas alam, sedangkan Israel merasakan akibat dari dibekukannya hubungan bisnis minyak dan gas oleh Mesir karena denda sebesar 1.73 Miliar dolar AS dan dengan alasan ini Steinitz meyakinkan Turki dan Israel untuk rekonsiliasi hubungan bilateral. Rekonsiliasi Turki dan Israel diresmikan pada bulan juni tahun 2016. Peresmian rekonsiliasi ini ditandai dengan diperbolehkannya Turki untuk membangun fasilitas penting di Gaza, Turki menarik syarat untuk mengakhiri blokade Gaza oleh Israel dan Israel berdamai dengan keberadaan Hamas di Turki.<sup>16</sup> Masalah yang bisa ditarik dari hal ini adalah “mengapa Turki memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Israel?” karena jika dipikirkan sejenak maka hubungan Turki dan Israel seharusnya putus secara penuh tetapi itu tidak terjadi, masalah ini dibahas dari perspektif Turki terhadap rekonsiliasi ini.

---

<sup>14</sup> Özkeçeci-Taner, B. (2012). From Allies to Frenemies and Inconvenient Partners: Image Theory and Turkish-Israeli Relations. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 17(3).

<sup>15</sup> Efron, S. (2018). *Future of Israeli-Turkish Relations*. Rand Corporation.

<sup>16</sup> Ibid

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membatasi penelitian hubungan Turki dan Israel dalam masalah konflik Israel-Palestina, khususnya dari perspektif Turki dengan jangkauan waktu dari tahun 2010 hingga 2016. Tahun 2010 karena Insiden Mavi Marmara terjadi pada tanggal 31 Mei 2010. Tahun 2016 dipilih dengan pertimbangan proses rekonsiliasi, tetapi dikarenakan ada beberapa hal yang masih dibicarakan hingga tahun 2018 maka dua tahun selanjutnya akan dimasukkan dalam penelitian.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Melalui latar belakang, dan identifikasi masalah, serta pembatasan masalah tersebut maka penulis akan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Determinan internal dan eksternal apa sajakah yang mempengaruhi proses rekonsiliasi Turki dan Israel pasca insiden Mavi Marmara dari perspektif Turki?”

### **1.5 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Turki untuk melakukan rekonsiliasi dengan Israel pasca insiden Mavi Marmara.

### **1.6 Kegunaan penelitian**

Harapan peneliti akan manfaat dari penelitian ini agar bisa menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari hubungan Turki dan Israel.

### **1.7 Literature review**

Dalam “*From Allies to Frenemies and Inconvenient Partners : Image Theory and Turkish Israeli Relations*” oleh Binnur Özkeçeci-Taner<sup>17</sup>, dia berusaha untuk menjelaskan kondisi hubungan Turki dan Israel pada waktu jurnal ini diterbitkan dan mencoba memprediksi kondisi hubungan mereka di masa yang akan datang. Hubungan Israel dan Turki dikatakan sudah mulai dari tahun 1949 dimana Turki adalah negara Islam pertama yang mau mengakui kedaulatan Israel. Dari sana Hubungan Turki dan Israel semakin membaik sebelum tahun 2002 dimana Israel menyerang kota Jenin, Palestina dan dari saat itu situasi hubungan antara Turki dan Israel semakin

---

<sup>17</sup> Özkeçeci-Taner, B. (2012). From Allies to Frenemies and Inconvenient Partners: Image Theory and Turkish-Israeli Relations. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 17(3).

memburuk. Hal yang memperparah hubungan antara Turki dan Israel lainnya adalah ketika Israel menyerang jalur Gaza selama tiga minggu pada Desember 2008, insiden “Davos” yang terjadi dalam *World Economic Forum* di kota Davos karena Erdogan merasa tidak diberikan kesempatan untuk berbicara kepada presiden Israel Shimon Peres, dan insiden “Flotilla” atau “Mavi Marmara” yang membuat hubungan kedua negara tersebut jatuh ke titik terendah. Ada satu hal lagi tapi efeknya tidak terlalu buruk.

Jurnal ini menggunakan pendekatan *Foreign Policy Decision Making* dan *Image Theory* untuk membantu menjawab pertanyaan bagaimana terjadinya sebuah perubahan terhadap hubungan Turki dan Israel. Pendekatan *Foreign Policy Decision Making* mengatakan bahwa pembuat keputusan (atau *Decision Makers*) mampu menjadi sebuah pengaruh besar terhadap arahan politik luar negeri suatu negara baik itu dari perspektif tentang masalah tertentu, opsi yang dipilih serta cara implementasi masalah tersebut. Pembuat keputusan juga bisa mempengaruhi opini publik dalam usaha memberikan justifikasi atas tindakan yang dipilih. Teori yang digunakan adalah *Image Theory* yang mengatakan bahwa sistem kepercayaan dan image menjadi penting dalam analisa politik luar negeri karena mampu mempengaruhi pembuat keputusan dalam menangani arahan politik luar negeri mereka baik karena *image* yang negara tertentu merasa memiliki atau sebagai respon terhadap image negara lain baik itu dengan menjalin hubungan baik atau mencap negara tersebut sebagai sebuah ancaman. *Image* dalam hal ini sulit untuk diubah dan apabila memang berubah maka perubahan ini tidak bisa diprediksi. Jurnal ini mengatakan bahwa hubungan Turki dan Israel sedang menuju arah yang “tidak terlalu bersahabat” dan terlihat adanya implikasi perubahan image dan perspektif antara Turki dan Israel terhadap satu sama lain tetapi apakah perubahan image tersebut benar terjadi atau tidaknya masih tidak diketahui

Penulis berpendapat bahwa perubahan *Image* Turki terhadap Israel dan sebaliknya benar terjadi tetapi perubahannya tidak terlalu signifikan, bila dibandingkan dengan kejadian pada Desember 2008 dimana Turki merasa dipermalukan dan dikhianati oleh Israel dan setelah insiden “Flotilla” yang merenggut nyawa aktivis sipil Turki maka perubahan ke arah yang lebih buruk tidak bisa dihindari, namun Turki sebagai negara Islam pertama yang mau mengakui kedaulatan dan berteman dengan Israel menunjukkan mereka masih membutuhkan satu sama lain jadi perubahan image yang ada tidak mungkin memperburuk hubungan kedua negara tersebut hingga mencapai sebuah peperangan.

Artikel lain yang digunakan dalam *literature review* adalah “*Israel : Quo Vadis, Turkey?*” Oleh Oded Eran<sup>18</sup>. Artikel ini memberikan sebuah argumen bahwa insiden “Mavi Marmara” atau “Flotilla” dianggap sebagai manuver politik Turki agar bisa membawa dirinya menjadi sebuah kekuatan besar di kawasannya. Oded Eran, direktur dari Institut Pengkajian Keamanan Nasional Israel mengatakan bahwa Turki telah mengidentifikasi adanya kekosongan kekuasaan yang telah ditinggal oleh Amerika Serikat dengan mundur dari kawasan Timur Tengah juga dengan kebutuhan Eropa dan Amerika Serikat akan keaktifan Turki. Dalam kondisi ini Turki bisa menjadi sebuah kekuatan besar di kawasan Timur Tengah dengan keuntungan luar biasa secara domestik maupun internasional.

Di sisi lain, artikel ini mengatakan bahwa sementara hubungan Turki dan Israel memburuk tetapi hubungan Turki dengan negara lain seperti Iran dan Suriah membaik. Turki sempat membuat permintaan kepada Israel untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi atas insiden Mavi Marmara, ini juga dianggap Israel sebagai langkah lain dalam manuver yang sama agar posisi Turki meningkat.

Artikel ini juga mengatakan bahwa memburuknya hubungan Turki dan Israel memiliki unsur kesalahan dari Israel sendiri. Salah satunya adalah ketika perdana menteri Israel Olmert pada waktu itu gagal untuk memberitahukan Turki akan serangan ke Gaza (Operation Cast Lead) padahal Turki dan Israel baru menyelesaikan sebuah persetujuan untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan cara yang damai. Kesalahan lainnya adalah setelah ada pergantian perdana menteri Israel menjadi Netanyahu, dimana dia memutuskan untuk tidak melakukan negosiasi dengan Suriah yang dipimpin Bashar Al-Assad dengan asumsi kejadian di Suriah mampu menurunkan Assad dari kursi kekuasaan. Tindakan ini menurut Oded sah saja dan masuk akal namun Netanyahu tidak menyampaikan sebuah apresiasi pada Turki yang saat itu bersedia membantu dalam negosiasi tidak langsung dan mau membantu lagi ketika Israel mau membuka jalur negosiasi dengan Suriah, tindakan ini seolah olah Israel tidak membutuhkan Turki sama sekali. Artikel ini pada akhirnya mengatakan bahwa hubungan Turki dan Israel bisa membaik tetapi akan memakan waktu yang cukup lama dan bisa dikatakan cukup sulit bagi kedua negara

---

<sup>18</sup> Eran, O. (2011). Israel: Quo Vadis, Turkey?. *Insight Turkey*, 13(4), 31.

karena insiden Mavi Marmara sudah berlalu dan waktu untuk memberikan permintaan maaf dan kompensasi kepada Turki sudah lewat

Penulis setelah membaca artikel ini merasa setuju bahwa apabila Israel berbicara dengan Turki apalagi mengenai masalah Operation Cast Lead maka tindakan Turki pada waktu itu tidak akan membuat Israel jatuh dalam posisi yang tidak diinginkan. Bahkan sebelum Operation Cast Lead ada insiden dengan tempat pengungsian di kota Jenin, Palestina yang diserang Israel yang menewaskan warga sipil Palestina dan itu membuat Turki merasa kesal dengan tindakan yang diambil Israel. Penulis harus setuju bahwa hubungan Israel dan Turki bisa membaik meskipun dalam waktu yang sangat lama apalagi karena Turki adalah negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan Israel yang merupakan tanda dimulainya hubungan yang baik, Turki tidak akan semena mena mencap Israel sebagai musuhnya secara langsung.

Dokumen selanjutnya yang digunakan dalam literature review adalah “*Altercating Interest and Orientations between Israel and Turkey : A View From Israel*” oleh Ofra Bengio<sup>19</sup>. Esai ini menganalisis hubungan Israel dan Turki semenjak partai AK di Turki mengambil kursi kekuasaan dalam kepemimpinan Erdogan. Artikel ini mengatakan bahwa orientasi politik luar negeri Turki dalam kepemimpinan partai AK pada dasarnya adalah agar Turki menjadi lebih aktif dan terlibat dalam negosiasi dengan negara Arab lainnya, menjadi mediator dalam berbagai masalah regional dan ingin memiliki peran yang sangat penting dalam kawasannya yang bisa disebut sebagai Neo-Ottomanism atau Turkish Grand Strategy. Esai ini mengatakan bahwa terjadi sebuah hubungan yang asimetris antara Turki dan Israel, dimana Turki selalu mengkritik keputusan Israel mengenai Palestina secara langsung sedangkan Israel memilih untuk diam dan tidak mengkritik keputusan Turki mengenai suku Kurdi.

Meskipun hubungan antara Turki dan Israel tampak memburuk tetapi Israel dan Turki memiliki kepentingan yang mirip dan salah satunya adalah mengenai masalah terorisme, Turki dan Israel menyatakan keseriusan mereka untuk memerangi terorisme meskipun definisi terorisme berbeda. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah Iran mengenai nuklir, Turki dan Israel tahu apabila Iran membuat senjata nuklir maka peta kekuatan di kawasan Timur Tengah bisa

---

<sup>19</sup> Bengio, O. (2009). *Altercating interests and orientations between Israel and Turkey: a view from Israel. Insight Turkey*, 43-55.

berubah drastis. Turki enggan melakukan sesuatu yang berpotensi memperburuk hubungan dengan Iran dan Israel disebut melakukan pekerjaan kotor dengan mengkritik Iran dan program nuklirnya. Hubungan strategis ini bisa dilihat dari fakta bahwa sekretaris jenderal dari National Security Council negara Turki (*Milli Güvenlik Kurulu*, MGK) berkunjung ke Israel pada Mei 2005 yang lalu.

Artikel ini menyimpulkan bahwa kondisi hubungan Israel dan Turki yang memburuk bukan karena masalah yang bersifat bilateral, tetapi karena masalah yang melibatkan pihak ketiga, Memang Turki dan Israel memiliki hubungan strategis mengenai Iran tetapi masalah seperti konflik Israel-Palestina membuat situasi memburuk. Hubungan bilateral kedua negara ini cukup kuat dan sudah berhubungan secara baik seiring waktu karena hubungan strategis, ekonomi, dan sosial mereka sudah cukup dalam sehingga mereka mampu mengatasi krisis yang bersifat bilateral tanpa masalah lebih lanjut.

Penulis setelah mengetahui Turki merupakan negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan Israel merasa terkejut bahwa hubungan kedua negara ini sudah cukup dalam dan membaik dalam masalah yang bersifat bilateral. Penulis harus setuju bahwa Turki dalam kepemimpinan Erdogan semakin aktif di kawasan Timur Tengah dan penulis berpendapat bahwa resiko semakin aktifnya suatu negara dalam suatu kawasan adalah keharusan untuk memberikan respon yang terjadi di kawasan baik itu yang berhubungan dengan sekutu maupun musuh mereka dan di artikel ini Turki terlihat aktif mulai dari perbaikan hubungan dengan negara arab lainnya termasuk Iran dan menjadi mediator khususnya bagi Israel dan negara arab lainnya.

### **1.8 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai pengertian politik luar negeri secara konsep, dilanjutkan dengan konsep kepentingan nasional, lalu menjelaskan mengenai teori Neo-Classical Realism, kemudian menjelaskan determinan internal dan determinan eksternal lalu diakhiri dengan konsep rekonsiliasi.

Pengertian politik luar negeri ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam berbagai definisi. Salah satunya adalah George Modelski berpendapat bahwa politik luar negeri adalah

“sistem aktivitas yang berevolusi oleh komunitas untuk mengubah tingkah laku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas mereka sendiri dalam lingkungan internasional”.<sup>20</sup>

Padelford dan Lincoln berpendapat bahwa “Politik luar negeri adalah elemen kunci dalam proses menterjemahkan tujuan suatu negara yang dipahami secara luas menjadi tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan dan menekankan kepentingan nasional negara tersebut”.<sup>21</sup>

F.S Northedge menganggap bahwa politik luar negeri adalah penggunaan pengaruh politik yang menyebabkan negara lain untuk menjalankan kekuatan pembuat keputusan dalam sikap yang diinginkan oleh negara yang menggunakan pengaruhnya. Merupakan sebuah interaksi antara kekuatan yang berasal dari luar batas negara dan mereka yang bekerja dalam batas negara tersebut.<sup>22</sup>

Institusi Riset Brookings mengatakan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah jalan politik yang dinamis dan kompleks dari suatu negara yang diikuti dengan relasinya dengan negara lain. Politik luar negeri suatu negara adalah hasil gabungan dari kebijakan luar negerinya dan hal lain seperti komitmen, bentuk kepentingan nasionalnya, dan juga prinsip tindakan yang diambil negara tersebut.<sup>23</sup>

Apabila disimpulkan dari tiga definisi di atas maka politik luar negeri adalah interaksi yang dilakukan oleh berbagai negara baik itu secara bilateral maupun multilateral dan tindakan ini merupakan cerminan dari kepentingan nasional suatu negara mulai dari langkah yang diambil hingga respon atas kebijakan yang dipilih.

Selanjutnya adalah penjelasan tentang kepentingan nasional. Politik luar negeri suatu negara merupakan cerminan kepentingan nasional negara tersebut, tetapi definisi kepentingan nasional sendiri itu bagaimana? James F. Miskel dalam *Naval War College Review* mengatakan bahwa secara umum ada dua sekolah yang telah berusaha untuk mendefinisikan kepentingan nasional secara mendasar. Salah satunya bisa dikatakan sebagai sudut pandang realis dimana

---

<sup>20</sup> Modelski, G. (1962). *A theory of foreign policy* (No. 2). Praeger for the Center of International Studies, Princeton University.

<sup>21</sup> Padelford, N. J., Lincoln, G. A., & Olvey, L. D. (1976). *The dynamics of international politics*. New York: Macmillan Publishing Company.

<sup>22</sup> Northedge, F. S. (Ed.). (1968). *The foreign policies of the powers*. London: Faber.

<sup>23</sup> Balfour, N. (1953). *Major Problems of United States Foreign Policy 1952–1953*.

negara seharusnya mendefinisikan kepentingan nasionalnya berdasarkan bentuk kekuatan yang nyata dan bernilai tinggi seperti pengaruh satu negara terhadap negara lain atau kekuatan militer secara langsung. Sekolah ini berpendapat bahwa tantangan pemimpin negara apabila mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan pemikiran seperti ini adalah bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan tempat negara tersebut sebagai negara yang paling berpengaruh di suatu kawasan. Versi yang lebih sederhana dan mudah dimengerti adalah kepemilikan senjata seperti Otto von Bismarck dengan meriam dan senjata laras panjang atau Nixon dengan senjata nuklir dan pesawat bomber (sesuai dengan era yang bersangkutan) yang lebih banyak demi mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>24</sup>

Cara pandang lain yang cukup umum dalam mendefinisikan kepentingan nasional adalah dengan mengikutsertakan hal yang tidak tampak secara nyata tetapi tetap bernilai tinggi untuk suatu negara dengan contoh berupa nilai penting seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan lainnya. Negara dalam hal ini menggunakan kekuatannya untuk mengedepankan nilai-nilai berikut dengan contoh seperti Vladimir Lenin dengan egalitarianisme ekonomi dan Woodrow Wilson dengan *national self-determination*.<sup>25</sup>

Ada yang mengatakan dua definisi kepentingan nasional tersebut terbilang kaku dan kepentingan nasional bisa berubah dan beradaptasi tergantung siapa yang berada di kursi pemerintahan dan kondisi internal maupun kondisi eksternal tetapi pada dasarnya bisa disetujui bahwa kepentingan nasional adalah garis besar suatu negara dalam mencapai tujuan tertentu mulai dari alokasi sumber daya yang ada hingga tujuan kekuatan militer suatu negara apabila harus turun tangan secara langsung.<sup>26</sup>

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah determinan atau faktor internal dan eksternal. Lloyd Jensen dalam buku *Explaining Foreign Policy* mengatakan bahwa dalam menganalisa politik luar negeri, setiap keputusan memiliki banyak faktor yang mempengaruhi selain dari cara politik luar negeri suatu negara dibentuk. Lloyd menjelaskan bahwa ada tujuh faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dan enam di antaranya merupakan

---

<sup>24</sup> Miskel, J. F. (2002). National interests: Grand purposes or catchphrases?. *Naval War College Review*, 55(4), 96-104.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Kaplan, M. A. (2014). Values, national interests, and other interests. *International Journal on World Peace*, 31(2), 57.

determinan internal. Lloyd Jensen melakukan pembahasan dari tingkat yang paling kecil hingga tingkat yang lebih luas.<sup>27</sup>

Determinan yang dibahas pertama oleh Lloyd adalah faktor individu, atau para pembuat keputusan untuk lebih spesifik. Dalam bukunya para pembuat keputusan memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap politik luar negeri suatu negara khususnya kepribadian dan ketertarikan si pembuat keputusan tersebut terhadap isu politik luar negeri. Jika ketertarikannya tinggi maka pengaruh kepribadiannya juga akan tinggi dan pengaruh ini akan dibentuk dari riwayat hidupnya mulai dari lingkungan dimana dia dibesarkan, persepsi individu, motivasi, dan respon yang dipelajari semasa hidup. Dalam buku ini Lloyd Jensen mengatakan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat organisasi yang lebih tinggi (seperti pemimpin) bila dibandingkan dengan tingkat organisasi yang lebih bawah. Alasan utama dari hal ini adalah karena dalam tingkat atas suatu organisasi, peran yang dilakukan oleh sosok pemimpin tidak terlalu jelas dan kendala dalam mengambil keputusan tersebut baik itu aturan internal organisasi atau batasan yang jelas dalam suatu peran semakin berkurang, jika batasan tersebut berkurang maka yang menggantikannya adalah kepribadian dan kecenderungan individu memegang peran besar dalam pengambilan keputusan<sup>28</sup>

Determinan kedua yang dibahas adalah kondisi masyarakat suatu negara. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah karakter nasional. Karakter nasional ini pada dasarnya adalah karakter yang umumnya dimiliki oleh rakyat suatu negara, meskipun tidak semuanya sama tetapi karakter mayoritas bisa disebut sebagai karakter negara tersebut, karakter nasional ini bisa menjadi hal yang mempermudah atau mempersulit hubungan dua negara tertentu dikarenakan perbedaan atau persamaan karakter yang sangat mencolok, orang cenderung takut dengan orang lain yang memiliki perbedaan dengan diri mereka sendiri baik dari segi agama, kebiasaan, suku, orientasi politik maupun orientasi seksual dan dalam kasus dimana hubungan dua negara yang buruk maka bisa muncul berbagai macam stereotip bagi warga negara tertentu yang dikaitkan dengan karakter nasional mereka. Faktor selanjutnya adalah nasionalisme suatu negara. Nasionalisme bisa disebut sebagai tingkat afeksi masyarakat terhadap negaranya, apabila tingkat nasionalisme tinggi maka kebijakan luar negeri akan lebih mudah untuk didukung dan begitu pula sebaliknya. Kondisi

---

<sup>27</sup> Jensen, L. (1982). *Explaining foreign policy*. Englewood: Prentice Hall.

<sup>28</sup> Ibid 13-44

negara tentunya mempengaruhi faktor nasionalisme ini, salah satu contohnya adalah akibat kesenjangan ekonomi suatu negara bisa menyebabkan daerah yang berada dalam kondisi ekonomi yang cukup buruk mulai berpikir untuk melakukan separatisme dengan negara asal dengan harapan akan peningkatan kondisi ekonomi yang baik apabila urusan ekonomi dipegang oleh daerah sendiri. Contoh lainnya adalah apabila masyarakat berhasil diyakinkan akan adanya musuh bersama seperti ras tertentu atau agama tertentu, masyarakat akan mendukung berbagai macam kebijakan untuk mengatasi musuh bersama tersebut dan tingkat nasionalisme negara akan naik. Faktor berikutnya adalah atribut masyarakat. Buku ini mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki heterogenitas yang tinggi memiliki kemungkinan konflik yang tinggi pula walaupun tidak selalu benar, salah satu alasan konflik bisa terjadi adalah dengan pengaruh negara lain yang memikan pihak minoritas suatu negara. Satu hal lainnya yang dipengaruhi atribut nasional ini adalah kestabilan negara, ini adalah sesuatu yang sangat jelas karena kondisi negara yang tidak stabil baik itu melalui konflik seperti perang saudara atau alasan lain di luar konteks masyarakat akan mempersulit suatu negara untuk mengambil suatu keputusan baik itu domestik atau internasional.<sup>29</sup>

Determinan internal selanjutnya adalah ideologi dan tradisi historis. Ideologi dan tradisi historis suatu negara membentuk apa yang disebut sebagai sistem kepercayaan baik itu kepercayaan untuk terus berperan aktif maupun sebaliknya. Sistem kepercayaan tidak selalu mutlak tetapi perubahannya akan memakan waktu yang sangat lama tetapi hal ini mempengaruhi persepsi negara tentang isu tertentu, menetapkan sejumlah pilihan untuk para pembuat keputusan, bahkan untuk membantu memperkuat propaganda tertentu. Salah satu contoh yang dibahas oleh Lloyd Jensen adalah Amerika Serikat yang dulu bersifat isolasionis sebelum menjadi intervensionis setelah perang dunia kedua. Perubahan kepercayaan bahwa Amerika harus menjadi “polisi” dunia mengubah gaya politik luar negeri Amerika Serikat secara drastis sampai ada yang menyebut perubahan ini sebagai arogansi negara. Fungsi sistem kepercayaan ini ada enam, salah satunya adalah sebagai cara melihat suatu fenomena internasional yang mungkin bisa diinterpretasi ulang agar sesuai dengan sistem kepercayaan yang ada. Fungsi selanjutnya adalah memberikan batasan dan jarak yang jelas dalam memilih tindakan apa yang akan dipilih karena semua pengambil keputusan tidak mau mengambil tindakan di luar batas nyaman mereka. Fungsi

---

<sup>29</sup> Ibid 46-69

ketiga adalah memberi kontinuitas bagi negara, ini biasanya terlihat dalam negara yang memiliki sistem kepercayaan yang sangat komprehensif dan dibentuk sejak lama sedangkan negara yang baru berdiri mungkin tidak memiliki sistem kepercayaan yang utuh sehingga mudah dipengaruhi untuk memilih langkah yang jauh berbeda dari pemikiran pengambil keputusan tersebut. Fungsi ke empat dan kelima adalah memberikan rasionalisasi dan justifikasi pemilihan langkah politik luar negeri dan bisa digunakan sebagai propaganda suatu negara. Fungsi terakhir adalah meningkatkan persatuan nasional. Tidak lupa disebutkan bahwa negara yang memiliki Ideologi sama cenderung berhubungan baik dengan negara yang tidak memiliki ideologi yang sama.<sup>30</sup>

Politik luar negeri suatu negara tidak akan bisa lepas dari proses pembuatan keputusan (*Decision Making Process, DMP*) dan ini juga menjadi determinan selanjutnya dalam menganalisa politik luar negeri. Proses pembuatan keputusan keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh struktur pemerintahan negara tertentu dan memiliki sisi baik dan sisi buruk masing masing. Negara yang otoriter cenderung cepat dalam pembuatan suatu keputusan karena hambatan yang dialami terbilang sedikit karena bawahannya akan takut jika berani mempertanyakan keputusan tersebut, keputusan tersebut juga bisa dijalankan lebih konsisten tetapi sisi buruknya bisa dilihat apabila kondisi negara tersebut memaksa inovasi karena kebijakan di rezim otoriter tergolong kaku. Negara yang demokratis di sisi lain mampu memberikan keputusan yang mampu beradaptasi dengan situasi seiring waktu tetapi tekanan dari opini publik dan birokrasi dalam pemerintahan menyebabkan keputusan membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat. Di sisi lain keputusan yang dibuat dalam masa krisis cenderung cepat untuk dibuat dan diimplementasikan baik itu dari rezim otoriter maupun demokratis.<sup>31</sup>

Negara dalam pembuatan suatu kebijakan luar negeri serta dalam implementasinya harus memperhatikan kekuatan ekonomi negaranya sendiri. Lloyd Jensen pada buku yang sama membahas bahwa ada paham yang mengatakan konflik internasional bisa didasari dari masalah ekonomi suatu negara. Di sisi lain ada paham yang berlawanan dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia akan menumbuhkan interdependensi antar negara demi menciptakan dunia yang lebih terintegrasi. Dari dua paham tersebut Lloyd Jensen mengatakan bahwa faktor ekonomi bisa mempengaruhi politik seberapa aktifnya kebijakan luar negeri negara

---

<sup>30</sup> Ibid Page 104-105

<sup>31</sup> Ibid Page 154-156

tertentu bisa dijalankan. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang bagus akan bisa mempertahankan kebijakan luar negeri yang lebih aktif bila dibandingkan dengan negara yang memiliki ekonomi yang kurang baik karena ketersediaan sumber daya akan mempengaruhi hal tersebut<sup>32</sup>

Dari ekonomi suatu negara kita bisa melihat kapabilitas kekuatan suatu negara dalam politik luar negerinya. Kekuatan suatu negara datang dalam berbagai bentuk baik itu dalam bentuk pengaruh dalam posisi bernegosiasi agar negara lain mau membantu kepentingan nasional negara tertentu maupun kekuatan militer secara langsung yang mampu membuat negara lain menjadi takut untuk berhadapan langsung. Posisi geopolitik suatu negara mampu mempengaruhi kekuatan suatu negara tetapi Lloyd Jensen mengatakan bahwa dalam era penggunaan senjata nuklir membuat faktor geopolitik menjadi tidak terlalu relevan tetapi geopolitik masih bisa digunakan dalam menganalisa negara yang kurang maju.<sup>33</sup>

Sejauh ini determinan yang baru dibahas hanya determinan internal tetapi Lloyd Jensen mengatakan ada satu lagi determinan dalam menganalisa politik luar negeri suatu negara yaitu determinan yang berasal dari luar negara tersebut yaitu determinan eksternal dan sistemik. Tindakan yang diambil maupun pernyataan yang diberikan oleh negara lain mampu menjadi semacam insentif suatu negara untuk membuat suatu kebijakan baru atau merubah kebijakan luar negeri yang ada terhadap negara lain atau terhadap isu tertentu. Tentu saja perubahan ini tidak selalu bersifat bilateral karena pihak ketiga juga bisa menjadi pemicu perubahan kebijakan luar negeri. Pihak ketiga ini bisa saja berupa negara lain yang bertujuan untuk melakukan mediasi terhadap dua negara yang sedang berkonflik atau negara yang berpihak kepada salah satu negara yang sedang berkonflik, di sisi lain organisasi internasional seperti PBB bisa saja memaksa perubahan suatu kebijakan untuk dilakukan. Selain tindakan terhadap kebijakan tertentu, kondisi internal negara bisa juga menjadi insentif untuk mengubah kebijakan atau mengambil kebijakan baru. Sistem internasional juga mempengaruhi khususnya hukum internasional dimana negara ingin terlihat baik dengan membuat satu kebijakan mengenai isu tertentu. Distribusi kekuatan

---

<sup>32</sup> Ibid 196-197

<sup>33</sup> Ibid 229-230

internasional bisa juga menjadi sebuah acuan karena kondisi dunia yang bipolar maupun multipolar dapat membentuk kebijakan politik luar negeri yang berbeda juga.<sup>34</sup>

Lalu konsep terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rekonsiliasi, apa definisi rekonsiliasi? Berdasarkan Lexico, definisi rekonsiliasi adalah “pemulihan hubungan persahabatan” dan “tindakan untuk membuat satu pandangan atau kepercayaan menjadi kompatibel dengan kepercayaan lainnya”<sup>35</sup>. Kamus Cambridge mendefinisikannya sebagai “situasi dimana dua individu atau grup kembali bersahabat setelah mereka berselisih” dan “proses untuk membuat dua kepercayaan, ide, atau situasi yang berlawanan menjadi harmonis”.<sup>36</sup> Jika dilihat dari definisi tersebut maka tujuan dari rekonsiliasi adalah perdamaian atau harmoni yang bersifat permanen, bagaimana dengan definisi yang dicetuskan oleh para akademisi? John Borneman mengatakan bahwa “rekonsiliasi” adalah sebuah proyek agar kedua pihak yang antagonistik untuk mencari suatu titik persetujuan dalam suatu masalah agar mereka mau “berangkat dari kondisi kekerasan” dan mau hidup berdampingan dalam satu masa yaitu masa sekarang tanpa harus membuat “pengakhiran” yang bersifat radikal dari kedua pihak yang beresiko untuk memutus total hubungan yang sudah ada dan bersama menciptakan “awal yang baru”, keberangkatan menuju hubungan baru yang tidak ditandai oleh kekerasan siklikal tetapi dibuat dengan kepercayaan dan kepedulian.<sup>37</sup> Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh Priscilla Hayner dalam definisinya mengenai rekonsiliasi yaitu membangun atau membangun kembali hubungan sekarang yang tidak dihantui oleh konflik dan kebencian pada masa lalu.<sup>38</sup>

Holly Ackerman dalam “*National Reconciliation In the Case of Cuba : Definition and Analysis*” memberikan enam definisi rekonsiliasi dalam konteks Kuba. Definisi pertama adalah rekonsiliasi sebagai sebuah peristiwa. Pihak yang bertikai bertemu lalu berbicara dan memulai proses untuk menyelesaikan perbedaan mereka baik itu melalui kompromi salah satu pihak atau kompromi dari semua pihak yang terlibat, peristiwa ini bisa menjadi dasar untuk hubungan kedua pihak tersebut di masa yang akan datang dan menjadi dasar penting apabila hubungannya semakin

---

<sup>34</sup> Ibid 259-260

<sup>35</sup> Reconciliation. n.d. In *Lexico.com* Retrieved from <https://www.lexico.com/en/definition/reconciliation> (Diakses 10 April 2020)

<sup>36</sup> Reconciliation. n.d. In *dictionary.cambridge.org* Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reconciliation> (Diakses 10 April 2020)

<sup>37</sup> Borneman, J. (2002). Reconciliation after ethnic cleansing: Listening, retribution, affiliation. *Public Culture*, 14(2), 281-304.

<sup>38</sup> Hayner, P. (2002). *Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions*, London & New York.

membalik atau memburuk. Definisi kedua adalah rekonsiliasi sebagai peleburan identitas yang berkonflik. Dengan dihilangkannya identitas yang menyebabkan konflik seperti ras, agama, kelas dan hal lain yang bisa dikategorikan ke dalam “isme” lalu meleburkan identitas sisanya menjadi satu identitas. Definisi ketiga adalah keberadaan bersama diantara grup yang berbeda, definisi ini menyongsong adanya toleransi antar kelompok dan orang yang mengikuti definisi ini menganggap dirinya sebagai mediator demi tercapainya toleransi antar kelompok. Definisi ke empat adalah rekonsiliasi sebagai evolusi moral seorang individu, kedua pihak akan diminta untuk menilai kesalahan apa yang telah mereka buat dan mengakui dan “bertobat” dan kembali pada hubungan baik. Definisi ke lima adalah rekonsiliasi sebagai aturan hukum melalui penjaminan hak asasi manusia, definisi ini berfokus pada pembuatan keseimbangan yang baru setelah rekonsiliasi dan membuat hukum baru untuk menjaga keseimbangannya. Definisi terakhir adalah rekonsiliasi sebagai usaha membangun komunitas, definisi ini menekankan interdependensi antara pihak yang bertikai dan rasa hormat yang ada sebelum hubungan memburuk. Agar rekonsiliasi sukses maka semua pihak harus setuju bahwa dengan bersatu maka tujuan yang lebih besar bisa tercapai dibandingkan dengan menjaga pemisahan hubungan tersebut.<sup>39</sup>

Dengan beragam definisi tersebut mungkin bisa diaplikasikan ke dalam kelompok individu dalam satu negara tetapi apabila diterapkan secara internasional maka akan sedikit berbeda. Dengan melihat konsep determinan internal dan determinan eksternal oleh Lloyd Jensen maka keputusan negara untuk melakukan rekonsiliasi dengan negara lain pastinya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Lily Gardner Feldman dalam tulisannya berjudul “*The Principle and practice of ‘reconciliation’ in German foreign policy : relations with France, Israel, Poland and the Czech Republic*” menyebutkan bahwa Jerman yang menginginkan hubungannya membaik dengan negara tersebut setelah Perang Dunia Kedua memiliki alasan yang bersifat moral dan pragmatis. Lily juga menulis bahwa rekonsiliasi dalam suatu hubungan bilateral dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Sejarah, Institusi Internasional, Kepemimpinan, dan Konteks Internasional atau yang biasa disebut sebagai Dinamika Politik Internasional. Semua variabel ini membuat rekonsiliasi sebagai sebuah konsep tidak mengejar perdamaian yang sempurna dan hidup tanpa ketegangan apapun tetapi dengan memadukan perbedaan antar negara yang memungkinkan untuk bekerja sama dalam mengurangi efek buruk perbedaan masing-masing negara.

---

<sup>39</sup> Ackerman, H. (1999). National Reconciliation in the case of Cuba: Definition and Analysis. *Cuba in transition*, 9.

Variabel sejarah merupakan faktor yang mempengaruhi berdasarkan hubungan historis antara dua negara secara bilateral baik itu hubungan yang baik atau hubungan yang buruk, salah satu contoh yang diungkit adalah apabila suatu negara ingin meminta maaf atas kesalahannya dulu dan respon yang diberikan juga harus dipikirkan secara matang. Variabel ini meskipun terinspirasi dari imperatif moral tetapi kepentingan pragmatis juga masukan sebagai bahan pertimbangan.

Variabel selanjutnya adalah institusi internasional yang bersifat transnasional tidak menjadi variabel pusat dari upaya rekonsiliasi bilateral, institusi internasional bisa membawa sikap dan sudut pandang baru dalam hubungan antar negara dan memungkinkan untuk berkembangnya kepentingan bersama yang bisa difasilitasi oleh institusi tersebut. Meskipun dengan manfaat tersebut institusi tidak akan menjadi variabel yang sangat penting dalam rekonsiliasi hubungan bilateral suatu negara.

Variabel kepemimpinan memiliki peran penting karena menggerakkan satu negara dalam upaya rekonsiliasi hubungan tidak mudah dan sosok pemimpin perlu memberikan pesan kepada publik bahwa rekonsiliasi bilateral dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Sosok pemimpin bisa memberikan suatu negara rekonsiliasi yang bersifat individu dan kolektif bagi negaranya

Konteks internasional sebagai sebuah variabel bisa disederhanakan sebagai faktor pihak ketiga yang berupa negara lain. Pihak ketiga ini dalam proses rekonsiliasi bisa membuat kedua belah pihak untuk tidak bisa menghindari satu sama lain dan mengunci mereka dalam hubungan bilateralnya dan bisa menjadi insentif untuk rekonsiliasi, memfasilitasi perkembangan kepentingan bersama. Di saat yang sama pihak ketiga juga bisa menjadi faktor yang mempersulit rekonsiliasi baik secara langsung atau tidak langsung. Dinamika politik internasional yang selalu berubah membuat variabel ini bersifat fluktuatif dalam proses rekonsiliasi secara bilateral.<sup>40</sup>

## **1.9 Metodologi penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Flick Uwe dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis* mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah klasifikasi dan interpretasi material yang bersifat linguistik atau visual dan membuat pernyataan mengenai dimensi eksplisit dan implisit dan struktur dari “pembuatan makna” dalam materi

---

<sup>40</sup> Gardner Feldman, L. (1999). The principle and practice of ‘reconciliation’ in German foreign policy: Relations with France, Israel, Poland and the Czech Republic. *International Affairs*, 75(2), 333-356.

penelitian. Makna ini bisa berupa makna sosial atau makna subjektif.<sup>41</sup> Umar Suryadi Bakry dalam buku *Metode Penelitian Hubungan Internasional* menyimpulkan dari berbagai pendapat pakar metodologi penelitian mengenai penelitian kualitatif dalam lima poin :

1. Bahwa metodologi ini bertujuan untuk memahami, dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial
2. Peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian
3. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan objek. Bukan angka
4. Kelompok atau objek penelitian tidak terlalu luas dan tidak ditentukan secara acak
5. Hasil data bersifat verbal dan non numerik<sup>42</sup>

Sedangkan untuk metode yang akan dipilih khusus untuk penelitian ini adalah penelitian studi dokumen berbasis internet. Penelitian berbasis internet dalam hal studi dokumen digunakan untuk mencari penelitian terdahulu, pencarian buku, dengan topik yang mirip dan artikel berita dalam lingkungan topik yang sama lalu melakukan analisa dengan teori yang telah dipilih. Metode ini adalah salah satu metode yang terbilang cukup umum dalam penelitian Hubungan Internasional selain penelitian metode observasi, dan metode wawancara.<sup>43</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi baik pada saat ini atau di masa lampau. Karakteristik penelitian ini menurut Arief Furchan berupa :

1. Menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya dengan menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas dan dilakukan dengan cermat.
2. Tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan peneliti.<sup>44</sup>

Pendapat lain dari Ronny Kountur tentang ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada saat itu.
2. Menguraikan satu variabel saja atau lebih tetapi diuraikan satu-persatu.

---

<sup>41</sup> Flick, U. (Ed.). (2013). *The SAGE handbook of qualitative data analysis*. Sage.

<sup>42</sup> Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 14.0

<sup>43</sup> Ibid hal 67

<sup>44</sup> Furchan, A. (2004). *Pengantar penelitian dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).<sup>45</sup>

Singkatnya penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi baik itu di masa kini atau masa lampau dengan menguraikan variabel yang diteliti satu per satu tanpa adanya manipulasi dari variabel tersebut.

### **1.10 Sistematika pembahasan**

Penelitian ini membahas latar belakang masalah, teori yang digunakan, pertanyaan penelitian serta hal lainnya seperti pembatasan masalah, kegunaan serta tujuan penelitian dalam Bab 1 : Pendahuluan.

Bab 2 bertujuan untuk membahas konteks sejarah hubungan antara Turki dan Israel. Dimulai dari awal hubungannya dari posisi Turki sebagai negara Islam pertama yang mengakui Israel, Israel sebagai sekutu non religius bagi Turki, fluktuasi hubungan hingga insiden yang memperburuk hubungan kedua negara tersebut.

Bab 3 bertujuan untuk membahas rekonsiliasi antara Turki dan Israel, serta faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya rekonsiliasi untuk kedua negara tersebut. Faktor yang mempengaruhi ada yang berasal dari internal dan eksternal.

Bab 4 merupakan kesimpulan penelitian secara menyeluruh.

---

<sup>45</sup> Kountur, R. (2018). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM.